

Humanitas

Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial

HUBUNGAN ANTAR PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
DENGAN KARAKTERISTIK PROFESIONAL DAN MOTIVASI
H. Irawan Soehartono

REVITALISASI SEMANGAT ETHNIC PHILANTHROPY
R. H. Sumardhani

PENANGGULANGAN PERMASALAHAN PEKERJA ANAK
Abu Huraerah

MENGATASI TANTANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Tayu Hidayat

PENANGANAN KASUS KEKERASAN OLEH
JARINGAN RELAWAN INDEPENDEN (JaRi)
Imas Waryati

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PENATAAN RUANG DI JAWA BARAT
Yuce Sariningsih

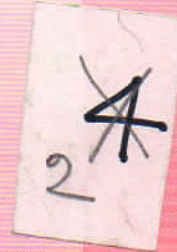
PENANGANAN KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
Riany L. Nurwulan

KEBIJAKAN BLT, MASALAH DAN DAMPAK KEBIJAKAN
Hj. Yuyun Yuningsih

MENINGKATKAN KECERDASAN ANAK
MELALUI GIZI SEIMBANG
Nina Kurniasih

Vol. 1, No. 1, Juli - Desember 2008

KEBIJAKAN BLT MASALAH DAN DAMPAK KEBIJAKAN
<http://digilib.unpas.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunpasp-gdl-yucesarini-1312&q=kebijakan%20blt#.Uv19N858GSo>





Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial
HUMANITAS

Penanggung Jawab/Responsible Official
Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial
FISIP UNPAS

Pemimpin Umum/Chairman
R. H. Sumardhani

Ketua Editor/Editor in Chief
Abu Huraerah

Editor/Editors
H. Irawan Soehartono
H. Ali Anwar

Mitra Bestari
Edi Suharto, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung.
Adi Fahrudin, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung.

Editor Pelaksana/Executive Editor
Hj. Yuyun Yuningsih

Tata Usaha/Publication Officer
Asep Supriatna

Tata Letak/Lay Out
David Arianto

Diterbitkan Oleh/Published by:
Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pasundan

Alamat Redaksi/Address
Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung 40261,
Telephone/Fax (022) 4205945. ISSN 1693-2358

Daftar Isi

Vol. 1, No. 1, Juli-Desember 2008

HUBUNGAN ANTARA PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN DENGAN KARAKTERISTIK PROFESIONAL DAN MOTIVASI H. Irawan Soehartono _____	1 - 9
REVITALISASI SEMANGAT ETHNIC PHILANTHROPY R. H. Sumardhani _____	10 - 14
PENANGGULANGAN PERMASALAHAN PEKERJA ANAK Abu Huraerah _____	15 - 21
MENGATASI TANTANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Tayu Hidayat _____	22 - 26
PENANGANAN KASUS KEKERASAN OLEH JARINGAN RELAWAN INDEPENDEN (JaRi) Imas Waryati _____	27 - 34
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG DI JAWA BARAT Yuce Sariningsih _____	35 - 44
PENANGANAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Riany L. Nurwulan _____	45 - 55
KEBIJAKAN BLT, MASALAH DAN DAMPAK KEBIJAKAN Hj. Yuyun Yuningsih _____	56 - 61
MENINGKATKAN KECERDASAN ANAK MELALUI GIZI SEIMBANG Nina Kurniasih _____	62 - 68

KEBIJAKAN BLT, MASALAH DAN DAMPAK KEBIJAKAN

Hj. Yuyun Yuningsih

(Kampus Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Besar 68 Bandung)

Abstrak

Setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan BBM, kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi kebijakan turunan dari kebijakan kenaikan BBM tersebut. Kebijakan BLT yang diluncurkan pemerintah ini, menuai banyak protes mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, mahasiswa dan tokoh-tokoh masyarakat baik nasional maupun daerah. Kebijakan yang sama juga pernah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2005, ketika pemerintah menaikkan BBM sebesar 126 persen.

Kata kunci: BLT, masalah dan dampak.

Pemanfaatan dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah merupakan suatu bentuk apresiasi dari perwujudan pemenuhan kebutuhan bagi keluarga miskin yang telah di data dan mendapatkan kartu keluarga miskin yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Upaya mengatasi kemiskinan tersebut telah dilakukan berbagai program dan kebijakan yang di buat oleh pemerintah mengeluarkan instruksi Presiden No 12 thn 2005 tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga miskin, sebagai kompensasi terhadap kenaikan barang dan jasa yang diakibatkan kenaikan BBM pada awal Maret 2005.

Pembangunan yang sedang dilaksanakan pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi atau menanggulangi masalah kemiskinan serta memenuhi kebutuhan dasar yang pokok individu, keluarga, atau masyarakat dikatakan yang berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan yang diperoleh di bawah rata-rata. Dalam kaitan ini upaya untuk mengatasi kemiskinan harus mampu memberdayakan masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Ginanjar Kartasasmita yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang dengan titik tolak bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki daya (potensi) yang dapat dikembangkan.

Penanggulangan kemiskinan dapat efektif apabila ada campur tangan dari luar, karena kemiskinan bukanlah sesuatu yang terwujud sendiri terlepas dari aspek-aspek lainnya, tetapi kemiskinan itu terwujud sebagai hasil interaksi antara aspek yang ada dalam kehidupan manusia, aspek-aspek tersebut terutama aspek politik dan budaya.

Upaya mengatasi kemiskinan tersebut telah dilakukan berbagai program dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam kebijakan tersebut pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 (Inpres 12/2005) tentang Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga miskin, sebagai kompensasi terhadap kenaikan harga barang dan jasa yang diakibatkan kenaikan BBM pada awal Maret 2005 dan pemerintah meluncurkan Program Kompensasi Subsidi BBM (PKPS-BBM) yang pada tahun anggaran 2005 meliputi :bantuan atau subsidi di bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan infrastruktur pedesaan termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan BBM, kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi kebijakan turunan dari kebijakan kenaikan BBM tersebut. Kebijakan BLT yang diluncurkan pemerintah ini, menuai banyak protes mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, mahasiswa dan tokoh-tokoh masyarakat baik nasional maupun daerah. Kebijakan yang sama juga pernah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2005, ketika pemerintah menaikkan BBM sebesar 126 persen.

Disatu sisi, kebijakan BLT ini mungkin akan memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin. Dengan BLT, kenaikan biaya hidup yang diakibatkan oleh kenaikan BBM secara langsung maupun dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat kenaikan BBM, akan sedikit tertutupi dengan adanya dana "cuma-cuma" yang diberikan oleh pemerintah. Akan tetapi disisi yang lain kebijakan BLT ini memiliki dampak negatif yakni kebijakan ini akan berdampak negatif pada perilaku dan karakter masyarakat. Kebijakan ini sangat riskan menciptakan karakter masyarakat yang salalu dimanja dan menjadi bangsa "peminta-minta". Selain itu, permasalahan efektifitas dan efisiensi kebijakan ini juga sangat diragukan, apalagi kalau kita melihat bahwa landasan kenaikan BBM adalah kondisi deficit keuangan negara yang semakin membengkak (bertolak belakang dengan kebijakan BLT).

Apabila melihat kebijakan BLT ini, kebijakan pro-poor melainkan untuk menaikkan de untuk mempertahankan

Dilihat dari untuk membantu miskin melainkan mempertahankan imeg diambil oleh pemerin 2009.

Dilihat dari ef kebijakan BLT masih kemiskinan atau bah Efisiensi dan efektifi BLT dimasa lalu (Ket BLT 2005, pemerintah Keluarga Harapan.

Kalau melihat kebijakan BLT tidak masyarakat miskin d seimbang dengan kena harga BBM. Coba kita biaya untuk pemenuha input produksi masyar petani maupun nelaya kenaikan biaya hidup (miskin dengan nomina signifikan. Apalagi, penggunaan dana BLT

Selain itu, damp memberikan dampak melainkan kecender produktifitas. Kebijakan bukan "kail" kepada m

Berbicara kemis arah kebijakan yang bi

Apabila melihat tujuan, efisiensi, efektifitas dan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan BLT ini, kebijakan yang diluncurkan pemerintah ini bukanlah kebijakan yang pro-poor melainkan kebijakan yang pro-image. Kebijakan ini ditempuh pemerintah bukan untuk menaikkan derajat kesejahteraan masyarakat miskin, akan tetapi hanya bertujuan untuk mempertahankan image pemerintah (yang baik) di mata masyarakat.

Dilihat dari tujuan kebijakannya, kebijakan BLT bukanlah kebijakan pemerintah untuk membantu dan mengangkat masyarakat (meningkatkan derajat kesejahteraan) miskin melainkan hanya sebuah keputusan politik yang berorientasi untuk mempertahankan image pemerintahan di mata masyarakat. Kebijakan politis ini terpaksa diambil oleh pemerintah sehubungan semakin dekatnya jadwal pesta demokrasi pemilu 2009.

Dilihat dari efisiensi, efektifitas dan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan, kebijakan BLT masih jauh dari kategori efisien dan efektif dalam kerangka menyelesaikan kemiskinan atau bahkan kemiskinan baru yang ditimbulkan oleh kenaikan BBM tersebut. Efisiensi dan efektifitas tersebut sudah dibuktikan dengan pencapaian hasil kebijakan BLT dimasa lalu (Kebijakan BLT tahun 2005) dan melihat pencapaian hasil kebijakan BLT 2005, pemerintah juga sudah merubah kebijakan tersebut menjadi Kebijakan Program Keluarga Harapan.

Kalau melihat pada dampak yang akan ditimbulkan oleh kebijakan BLT ini, kebijakan BLT tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi masyarakat miskin di Indonesia. Ini disebabkan nominal BLT yang diberikan tidak seimbang dengan kenaikan biaya hidup yang ditanggung oleh masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Coba kita bayangkan, kenaikan BBM tersebut akan mendorong kenaikan biaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, mendorong kenaikan biaya input produksi masyarakat miskin yang kebanyakan berada pada sektor pertanian (baik petani maupun nelayan) yang berada di pedesaan. Apabila kita membandingkan total kenaikan biaya hidup (biaya pemenuhan kebutuhan dasar dan input produksi) masyarakat miskin dengan nominal dana BLT yang diberikan, kebijakan ini tidak akan berdampak signifikan. Apalagi, pemerintah tidak bisa menjamin efisiensi dan efektifitas penggunaan dana BLT yang diberikan kepada masyarakat.

Selain itu, dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan BLT tersebut tidak mampu memberikan dampak positif pada peningkatan produktifitas masyarakat miskin, melainkan kecenderungannya memberikan dampak negatif pada penurunan produktifitas. Kebijakan BLT hanya merupakan kebijakan yang hanya meberikan "ikan" bukan "kail" kepada masyarakat miskin.

Berbicara kemiskinan khususnya kemiskinan di Indonesia, ada dua landasan dan arah kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah. Landasan dan arah tersebut adalah

membantu masyarakat miskin dengan landasan prihatin/iba dan membantu masyarakat miskin dengan landasan untuk menaikkan derajat dan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin.

Kebijakan dengan landasan prihatin/iba diartikan sebagai kebijakan yang bersifat hanya memberi "ikan" kepada masyarakat miskin, bersifat temporer serta hanya bersifat pada rasa kasihan atau iba terhadap masyarakat miskin. Sedangkan kebijakan yang berlandaskan pada pencapaian meningkatkan derajat dan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin diartikan sebagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat dan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin dengan cara meningkatkan produktifitas masyarakat miskin atau dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin. Kebijakan tersebut juga merupakan kebijakan yang bersifat pada memberikan "kail", bersifat long-term dan berkelanjutan.

Melihat sifat yang hanya memberikan "ikan", bersifat temporer dan rasa kasihan/iba (kenaikan biaya hidup masyarakat miskin akibat dampak kenaikan BBM), kebijakan BLT yang diluncurkan pemerintah merupakan kebijakan yang bersifat iba dan tidak akan mampu menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia.

Kelemahan kebijakan BLT

Berkaca pada kebijakan BLT di masa lalu (kebijakan BLT tahun 2005) banyak kelemahan-kelemahan dan masalah-masalah yang akan ditimbulkan oleh kebijakan BLT ini, antara lain :

1. Kebijakan BLT bukan kebijakan yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan kemiskinan di Indonesia, ini dikarenakan kebijakan ini tidak mampu meningkatkan derajat dan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin
2. Efektifitas dan efisiensi penggunaan dana BLT yang tidak dapat diukur dan diawasi karena lemahnya fungsi pengawasan pemerintahan terhadap kebijakan tersebut
3. Validitas data masyarakat miskin yang diragukan sehingga akan berdampak pada ketepatan pemberian dana BLT kepada masyarakat yang berhak
4. Kebijakan BLT memiliki kecenderungan menjadi pemicu konflik sosial di masyarakat
5. Peran aktif masyarakat yang kurang/minim, sehingga optimalisasi kinerja program yang sulit direalisasikan
6. Dari sisi keuangan negara, kebijakan BLT merupakan kebijakan yang bersifat menghambur-hamburkan uang negara karena kebijakan tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan secara berkelanjutan dan tidak mampu menstimulus produktifitas masyarakat miskin

Perbedaan s
pedesaan, dari mu
sudah-sudah terjad
tergolong miskin na
versi BPS.

Sampai saat
politisi, mahasiswa
mereka menilai prog

Mereka menol
mengenai jumlah m
masyarakat miskin y
desa. Menurut mere
dapat menimbulkan
antarwarga.

Masalah data i
ternyata baru 1.000 ke
di 6.300 kecamatan d
ini sangat memprihati
Sepertinya pemerinta

Pemerintah sen
Menurutnya, data ya
diperbarui setiap tah
daerah yang menolak

Pada akhirnya c
Juni-Agustus 2008 seb
(23/5) di 10 kota. Selar
2008. Sepuluh kota ters
Palembang, Banjarmasin
dijadikan sasaran pen
sebesar Rp 14 triliun ur

Perbedaan sikap dalam menyikapi BLT masih berlanjut, terutama di tingkat pedesaan, dari mulai lurah sampai ketua-ketua RT. Mereka takut pengalaman yang sudah-sudah terjadi lagi, di mana mereka menjadi sasaran amuk masyarakat yang tergolong miskin namun tidak terdaftar dalam daftar rakyat miskin yang menerima BLT versi BPS.

Sampai saat ini penolakan masih tetap berlanjut. Mulai dari perangkat desa, politisi, mahasiswa hingga anggota masyarakat lainnya, semua menolak BLT karena mereka menilai program ini tidak mendidik dan berpotensi menimbulkan konflik.

Mereka menolak karena pemerintah masih menggunakan daftar lama versi BPS mengenai jumlah rakyat miskin penerima bantuan. Pada BLT tahun 2005 banyak masyarakat miskin yang tidak terdaftar mengamuk dan merusak rumah para aparat desa. Menurut mereka perbedaan data antara BPS dengan data yang ada di lapangan dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang berpotensi menimbulkan perpecahan antarwarga.

Masalah data ini menjadi kontroversi karena dari 6.300 kecamatan di Indonesia ternyata baru 1.000 kecamatan yang diperbarui datanya. Dan pembaruan data menyeluruh di 6.300 kecamatan di Indonesia baru akan dilaksanakan pada September 2008. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena hal ini dilaksanakan setelah tiga bulan BLT dibagikan. Sepertinya pemerintah tidak menyadari situasi rawan ini.

Pemerintah sendiri melalui menteri dalam negeri menyayangkan penolakan ini. Menurutnya, data yang akan dipakai adalah data versi BPS tahun 2005 yang telah diperbarui setiap tahunnya. Dia juga tidak akan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang menolak BLT, karena menurutnya, biar masyarakat yang menilai.

Pada akhirnya dana bantuan langsung tunai (BLT) tetap akan dibagikan untuk Juni-Agustus 2008 sebesar Rp 300.000,- per rumah tangga sasaran pada hari Jumat (23/5) di 10 kota. Selanjutnya, dana itu dibayarkan setiap tiga bulan sampai Desember 2008. Sepuluh kota tersebut adalah Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Palembang, Banjarmasin, Makasar, Kupang, dan Medan. Jumlah rumah tangga yang dijadikan sasaran penerima sebanyak 19,1 juta, sedangkan dana yang dianggarkan sebesar Rp 14 triliun untuk BLT tahun 2008.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, Abu 1990. *Kemiskinan dan kebutuhan Pokok*. Jakarta, Bunga Rampai.
- Dieter Everes, Ed, Mulyono Sumardi, 1982, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, Jakarta, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, CV Rajawali.
- Faturrahman, dkk.2004. *Dinamika Kependudukan dan kebijakan*, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Iskandar, Jusman, 1993. *Strategi Dasar Membangun Kekuatan Masyarakat*, Bandung. KOPMA STKS.
- Khaerudin H.Drs.2002. *Sosiologi Keluarga*,Yogyakarta,Liberti.
- Sherraden, Michael, 2006. *Aset Untuk Orang Miskin*,Jakarta, PT Grafindo Persada.
- Suharto, Edi 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung PT Refikaama.

Sumber lain :

- Buku Pedoman Umum Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan (UPMP) Minyak Tanah Tahun Anggaran 2005. Kementerian Dalam Negeri Jakarta.
- Buku Pelaksanaan Pendataan Rumah Miskin 2005. Badan Pusat Statistik Jakarta.
- Buku Petunjuk Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM.2005. Badan Pusat Statistik Jakarta.

Kita membutuhkan
itu kita dapatka
memenuhi zat
sampai usia 6 bu
ragam setiap ha
bayi. Kelenjar r
pengankaragan
yang pesat terja
Kurang gizi yang
kurang gizi tingk
gizi bayi dan kec
kesehatan fisik
dipunyai serta du
membentuk kual

Kata kunci: gizi

Pendahuluan

Kita membutul
itu kita dapatkan da